



KABUPATEN SELUMA

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Potensi KN Rp 1,46 M Belum Dikembalikan

Di Dinas PUPR dan Setwan

SELUMA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Sekretariat DPRD Seluma, belum mengembalikan potensi kerugian negara (KN) yang mencapai Rp 1,46 miliar. Potensi KN itu ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, saat mengaudit penggunaan APBD Seluma tahun anggaran 2018.

Potensi Kerugian Negara tersebut sudah mulai dicicil. Sebelumnya Dinas PUPR sudah mengembalikan sebesar Rp 665 juta dari total temuan Rp 990 juta. Kemudian Sekretariat DPRD sudah mengembalikan sebesar Rp 456 juta dari temuan Rp 1,6 miliar. Sehingga total anggaran yang belum dikembalikan ke kas daerah dari dua OPD ini mencapai

Rp 1,46 miliar lebih.

"Kami sudah mengirimkan surat ke dua OPD ini agar segera melunasi temuan tersebut, karena batas waktu pengembalian hanya 60 hari. Jangan sampai nanti diambil alih oleh aparat penegak hukum (APH)," kata Inspektur Inspektorat Seluma, Drs. Ramlan Fahmi.

Rincian temuan tersebut, untuk Sekretariat DPRD Seluma, terjadi pada tunjangan transportasi serta perjalanan dinas anggota DPRD Seluma pada tahun 2018 lalu. Selain itu juga ada temuan lain, namun hanya sebatas kesalahan administrasi. Sehingga langsung dilakukan perbaikan oleh OPD yang bersangkutan.

"Kami ingatkan ini, demi kebaikan bersama. Jangan sampai terjadi permasalahan ke depannya, apalagi sampai diproses hukum," ucap Ramlan.

Sebelumnya juga lima OPD sudah mengembalikan kerugian negara untuk temuan audit anggaran tahun 2017, yang dikeluarkan tahun 2018 sebesar Rp 1,3 miliar. Saat ini temua audit BPK untuk realisasi anggaran tahun 2018 telah keluar Juni lalu. Dari sejumlah OPD yang terdapat temuan tersebut, totalnya mencapai Rp 2,8 miliar.

Temuan itu ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan temuan Rp 24 juta. Lalu Dinas Kominfo sebesar Rp 25 juta. Selanjutnya Sekretariat DPRD Seluma dengan total temuan mencapai Rp 1,6 miliar. Kemudian Dinas PUPR sebesar Rp 990 juta lebih dan BKPSDM sebesar Rp 60 juta serta RSUD Tais Rp 84 juta. Selain Setwan dan Dinas PUPR, semuanya sudah menyelesaikan temuan potensi KN tersebut.

"Jika ditotal temuan tersebut mencapai

Rp 2,8 miliar. Ini untuk audit BPK realisasi anggaran tahun 2018 yang dikeluarkan Juni tahun ini," terang Ramlan.

Terpisah, Kadis PUPR Seluma, M. Syaipullah, ST, MM mengakui jika PUPR ada temuan dalam pekerjaan fisik tahun 2018 tersebut. Namun M. Saipullah optimis temuan tersebut dapat ditindak lanjuti. Karena sudah ada komitmen dengan rekanan atau pelaksana proyek tersebut. Di penghujung tahun 2019 ini, semua temuan tersebut akan dikembalikan seluruhnya.

"Buktinya sudah ada, sebagian telah dikembalikan oleh pihak rekanan. Janjinya diakhir tahun ini sisanya akan dikembalikan semuanya," ujar M. Saipullah.

Sementara Sekretaris DPRD Seluma, Deddy Soepriady, M.Si ketika di konfirmasi belum didapat jawaban, hingga berita ini disusun. (aba)